

Stefano Oktavian Manopo, 2015. The Role of Leadership in Ruarl Head on Rural Finacial Management (A Case Study in Seretan Timu Rural Lembean Timur District Minahasa Regency). The guidance by Prof. Dr. Drs. P. Rumapea, M.Si. and Dra. M. S. Pangkey, M.Si

ABSTRACT

The success of the village government can run smooth and well because it is supported by many factors, one important factor is the village finances because it is impossible for the village to be able to carry out the village administration effective and efficient without adequate financial support. This is due to the financial capacity of the village depends on the size and variety of sources of income as financial resources are owned by the village. Therefore, the leadership of the village head and village, excavation and management of the financial resources of the village should be sought as optimal as possible to reach the village government administration efficient and effective as well as adhering to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 Year 2007 regarding the General Guidelines for Financial Management village. The aim of the research is to describe, analyze and find out how the village head's leadership role in the management of village finances (Case Study in the village of Seretan Timu drag troughs Minahasa District of East Lembean).

This study used qualitative data analysis method presented descriptive with purposive sampling technique of sampling / sample aiming the number of informants there are fifteen informants.

From the results of existing research, the village head's leadership role in the financial management of the village has not been complete worked well because there is no budget is unclear or data were incomplete, income and expenses can not be measured because it is not in accordance with the conditions of the village and village regulations only kinship systems but with all the shortcomings of existing good cooperation with the village officials to seek the implementation of the financial management of the village with transparency, accountability and participation.

Keywords: The Role of Leadership, Financial Management Rural

PENDAHULUAN

Otonomi Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan tonggak strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pemerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Desa merupakan institusi pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintahan yang ada di desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan prosedur kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat, pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau melalui camat. Kemudian bersama Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan

laporan pertanggung jawabannya kepada masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan baik karena didukung oleh banyak faktor salah satu faktor yang penting adalah keuangan desa. Dengan kata lain, faktor keuangan desa memiliki peranan yang esensial karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan desa tergantung pada besar kecilnya dan macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh itu di bawah kepemimpinan kepala desa beserta perangkat desa, penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus diupayakan seoptimal mungkin untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna serta berpegang pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan desa dibidang keuangan, kepala desa mempunyai peran yang penting namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Hal yang bersifat pribadi, yaitu yang berada pada diri pemerintahan desa

sendiri, misalnya seni mengadakan pendekatan pada masyarakat desa, keterampilan menetapkan pungutan desa dan melaksanakan pungutan, penye-lenggaraan administrasi keuangan, kelincahan pemerintah desa di bida-ng keuangan tersebut.

2. Hal yang berada di luar diri dan di luar kemampuan pemerintah desa, misalnya inflasi, perubahan mone-ter, perkembangan ekonomi, peratu-ran perundang-undangan. (Bayu Surianingrat, 1992:117).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Peran Kepemim-pinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

Sesuai dengan perumusan masa-lah yang ada diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk meng-gambarkan bagaimana peran kepemim-pinan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa

METODE PENELITIAN

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang pemahamannya yaitu data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini diperkuat dengan pendapat Milles dan Hubberman (1992),

bahwa penelitian kualitatif ditentukan pada pemberian gambaran secara objektif yang sebenar-nya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu relita dan kondisi social dalam masyarakat.

Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007:5) peneli-tian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar almhiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Jane Richie dalam Moleong (2007;5) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan manusia yang diteliti.

Irawan (2006) dalam Anis F, dan K. Sapto Nugroho (2014:31) menjelaskan bahwa dalam fokus penelitian men-jelaskan fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menentang untuk diteliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas.

Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi ia memiliki bagian tertentu dari suatu yang besar. Yang menjadi fokus penelitian menggambarkan pilihan atas berbagai masalah dari Peran Kepe-mimpinan Kepala Desa dalam Penge-lolan Keuangan Desa.

Dalam penelitian ini pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2008:218-219) purposive sampling yaitu, informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesra, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Jaga 1 (satu) sampai 5 (lima), Tokoh Masyarakat (mantan Pejabat Kepala Desa) dan Masyarakat. Maka jumlah keseluruhan informan yang ada yaitu 15 (lima belas) informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Wawancara :

Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

wawancara semi struktur, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu interviewer membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori (*in depth interview*), Tujuan dari pada wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Pertanyaan kualitatif :

Pertanyaan kualitatif, berupa pedoman wawancara semi struktur (*semistruktur interview*) dengan memberikan sebuah pernyataan atau pertanyaan untuk kemudian mendapatkan data kualitatif digali lebih dalam.

3. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu, Teknik penunjang dalam memperoleh informasi tambahan dan pendukung dalam penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan adalah analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1992:20), dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yakni :

1. Reduksi data (*data reduction*) : Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*), dimana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.
2. Penyajian data (*data display*) : Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data.
3. Conclusion drawing/verification : Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Berikut gambar proses kegiatan analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman (1992).

Deskripsi hasil wawancara dengan 15 orang informan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat di buat rangkuman sesuai fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Seretan Timu sudah cukup baik dalam memimpin Desa Seretan Timu dimana sudah banyak perubahan yang Kepala Desa dan Perangkat Desa lakukan untuk membangun Desa Seretan Timu seperti program-program yang sudah dibuat yaitu pembuatan jalan kebun, air minum, talud, jalan desa/rabat beton dan lain-lain. Akan tetapi masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal APBDes dimana setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa Seretan Timu belum dapat terukur secara rasional karena tidak sesuai dengan kondisi Desa yang ada dan juga peraturan Desa hanya sistem kekeluargaan yang berlaku bukan hanya itu juga data-data yang belum lengkap atau anggaran yang belum jelas seperti retribusi air minum sebagai salah satu pendapatan Desa akan tetapi tidak mencukupi membayari para petugas air bersih maka dari itu tidak ada dana yang tersisah.

Oleh sebab itu Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas sebagai berikut :

1. *Transparansi*

PEMBAHASAN

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (LAN & BPKP 2000).

3. Partisipatif

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi mementingkan kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Permendagri, Nomor 37 Tahun 2007). Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Dari ketiga azas inilah pengelolaan keuangan desa bisa dapat terarah atau teratur sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Desa Seretan Timu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Seretan Timu belum

seungguhnya berjalan dengan baik dimana pengelolaan keuangan desa atau APBDes masih belum sesuai dengan anggaran yang ada.

Maka dari itu pemerintah desa harus lebih bekerja keras lagi dalam mengelola APBDes yang ada karena dengan begitu semua anggaran yang sudah di sepakati bersama dalam peraturan desa yang ada akan terlaksana sesuai dengan visi dan misi desa yang ada, dan juga dalam mengelola keuangan desa harus ada tiga azas yang sudah di kemukakan tadi yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisi-patif dengan begitu juga keuangan desa bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Dari kendala inilah yang menjadi catatan penting kepada pemerintah desa Seretan Timu dengan kendala ini administrasi seringkali terabaikan oleh sebab itu adanya kerjasama antar pemerintah desa, masyarakat, pemerintah kecamatan dan kabupaten yang ada agar pengelolaan keuangan desa bisa terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran di desa Seretan Timu Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa sehingga dapat membangun desa kearah yang lebih baik yaitu sebagai berikut :

1. Kepala desa beserta perangkat desa hendaknya terus melakukan upaya

untuk meningkatkan pendapatan desa yang pada nantinya juga akan berpengaruh pada keadaan keuangan desa dan terciptanya desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

2. Kepala desa beserta perangkat desa perlu meningkatkan pem-binaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan desa demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Fuad & Kandung Supto Nugroho, 2014, *panduan praktis penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Bayu Surianingrat.1992 *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta:PT.Rineka Cipta
- Esterberg, Kristin G, 2002. *Qualitative methods for the social research*. New York, McGrawHill.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Penerbit LAN, Jakarta.
- Miles Matthew B. dan A. Michael hubberman, 1992, *Analisis data kualitatif*, universitas Indonesia pers, Jakarta.

Sugiyono, 2008, metode penelitian administrasi, Alfabeta, Bandung.

Sumber lain :

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor.37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

PP Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang pedoman Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33.Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.